



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH  
PEDULI HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya penghimpunan data kriteria daerah peduli hak asasi manusia di Kabupaten Balangan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penghimpunan Data Kriteria Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH PEDULI HAK ASASI MANUSIA .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penghimpunan Data Kriteria daerah Peduli HAM bertujuan untuk:

- a. memotivasi pemerintah daerah Kabupaten untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- b. mengembangkan sinergitas Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- c. memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

## **BAB III KRITERIA**

### **Pasal 3**

- (1) Kriteria Daerah Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
  - a. hak atas kesehatan;
  - b. hak atas pendidikan;
  - c. hak perempuan dan anak;
  - d. hak atas kependudukan;
  - e. hak atas pekerjaan;
  - f. hak atas perumahan yang layak; dan
  - g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
- (2) Penilaian Kriteria Daerah Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil.
- (3) Penjabaran dan penilaian kriteria daerah Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Syarat untuk Kriteria Daerah Kabupaten Peduli HAM adalah :

1. Mengisi data penilaian kriteria Daerah Peduli HAM.
2. Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di isi oleh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta BUMN/BUMD atau Perusahaan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati.
3. Data penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertakan dengan dokumen pendukung.
4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh pengesahan dari:
  - a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
  - c. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Balangan; dan

f 1

- d. Pimpinan BUMN/BUMD atau Perusahaan Daerah di Kabupaten Balangan.
5. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen capaian implementasi HAM di Kabupaten Balangan pada tahun sebelumnya.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN DATA PENILAIAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koreksi aritmatika;
  - b. pemeriksaan keabsahan data lampiran yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta BUMN/BUMD atau Perusahaan Daerah Kabupaten Balangan;
  - c. pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan; dan
  - d. pemeriksaan relevansi antara data penilaian dengan dokumen pendukung yang disampaikan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta BUMN/BUMD atau Perusahaan Daerah Kabupaten Balangan.

##### **Pasal 7**

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, Bupati melalui Sekretaris Daerah melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

##### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghimpunan Data Kriteria Daerah Peduli Hak Asasi Manusia di Kabupaten Balangan dapat dibentuk Tim oleh Bupati Balangan.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan pengumpulan dan penyusunan Laporan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Balangan.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 2 Juni 2017

**BUPATI BALANGAN,**

ttd

**H. ANSHARUDDIN**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 2 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

**H. RUSKARIADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 36 TAHUN 2017**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 36 TAHUN 2017  
 TENTANG PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH KABUPATEN PEDULI  
 HAK ASASI MANUSIA

**PEJABARAN DAN PENILAIAN KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEDULI HAK ASASI MANUSIA**

HAK ATAS KESEHATAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
<b>STRUKTURAL</b>			<b>(REP)</b>	
1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai : - Penyelenggaraan/ Layanan Kesehatan			Ada Tdk ada	5 0
2 Prosentase Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	10%		≥ 10 % ≥ 5% < 10% ≥ 1% < 5% < 1%	5 4 3 0
<b>PROSES</b>			<b>30</b>	
3 Rasio Tenaga Dokter per penduduk	1 : 2.500	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Tenaga Dokter}}$	≤ 2.500 > 2.500 ≤ 5.000 > 5.000	2,75 1,75 0
4 Rasio Tenaga Dokter Spesialis per penduduk	1 : 16.000	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Tenaga Dokter}}$	≤ 16.000 > 16.000 ≤ 20.000 > 20.000	2,75 1,75 0
5 Rasio Bidan terhadap penduduk	1 : 1.000	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Bidan}}$	≤ 1.000 > 1.000 ≤ 1.500 > 1.500	2,75 1,75 0
6 Rasio Perawat terhadap penduduk	1 : 855	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Bidan}}$	≤ 855 > 855 ≤ 1.000 > 1.000	2,75 1,75 0

7 Rasio Puskesmas terhadap penduduk	1 : 16.000	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Puskesmas}}$	$\leq 16.000$ $> 16.000 \leq 20.000$ $> 20.000$	2,75 1,75 0
8 Rasio Puskesmas Pembantu terhadap penduduk	1 : 1.500	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Puskesmas Pembantu}}$	$\leq 1.500$ $> 1.500 \leq 2.000$ $> 2.000$	2,75 1,75 0
9 Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terakreditasi nasional	$\geq 1$		$\geq 1$ Tidak ada	2,5 0
10 Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi nasional (AN) di tingkat kecamatan	100%	$\frac{\sum \text{Kec. Yg memiliki Puskesmas AN}}{\sum \text{Kecamatan}} \times 100$	100% $> 80\% < 100\%$ $< 80\%$	2,75 1,75 0
11 Rasio ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	1 : 1.000	$\frac{\sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Tempat tidur RS}}$	$\leq 1.000$ $> 1.000 \leq 5.000$ $> 5.000$	2,75 1,75 0
12 Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Bayi	95%	$\frac{\sum \text{Bayi yang mendapat IDL}}{\sum \text{Bayi}} \times 100$	$\geq 95\%$ $\geq 70\% < 95\%$ $< 70\%$	2,75 1,75 0
13 Prosentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	$\frac{\sum \text{kepesertaan JKN}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$	$\geq 95\%$ $\geq 70\% < 95\%$ $< 70\%$	2,75 1,75 0
<b>BASIL</b>				60
14 Angka Kematian Bayi (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup	32	$\frac{\sum \text{Kematian Bayi}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 1.000$	$\leq 32$ $> 32 \leq 45$ $> 45 \leq 50$ $> 50$	20 10 5 0

15 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	306	$\frac{\sum \text{Kematian Ibu}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 100.000$	$\leq 306$ $> 306 < 340$ $> 340 < 400$ $> 400$	20 10 5 0
16 Prevelensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada Balita	10%	$\frac{\sum \text{Balita kurang Gizi} + \text{Gizi buruk}}{\sum \text{Balita}} \times 100$	$< 10\%$ $> 10\% < 20\%$ $> 20\% < 30\%$ $\geq 30$	20 10 5 0

**HAK ATAS PENDIDIKAN**

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	Nilai
<b>STRUKTURAL</b>				10
1 Produk Hukum Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan/ layanan pendidikan			Ada Tdk ada	5 0
2 Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	20%		$\geq 20\%$ $> 10\% < 20\%$ $> 5\% < 100\%$ $< 5\%$	5 4 2 0
<b>PROSES</b>				30
3 Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan	100%	$\frac{\sum \text{Kecamatan yang memiliki PKBM}}{\sum \text{Kecamatan}} \times 100$	100% $> 80\% < 100\%$ $> 70\% < 80\%$ $< 70\%$	3 2 1 0
4 Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tingkat kabupaten/kota	$\geq 1$		$\geq 1$ Tidak ada	3 0
5 Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa dan kelurahan	100%	$\frac{\sum \text{PAUD}}{\sum \text{Desa} + \text{Kelurahan}} \times 100$	100% $> 80\% < 100\%$ $\geq 70\% < 80\%$ $< 70\%$	3 2 1 0

6	Prosentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi minimal C	100%	$\frac{\sum \text{SD akreditasi A, B, C}}{\sum \text{SD}} \times 100$	100	100% ≥ 90% < 100% ≥ 80% < 90% < 80%	3 2 1 0
7	Tersedianya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terakreditasi minimal C	100%	$\frac{\sum \text{SMP akreditasi A, B, C}}{\sum \text{SMP}} \times 100$	100	100% ≥ 90% < 100% ≥ 80% < 90% < 80%	3 2 1 0
8	Tersedianya Madrasah Ibtid'iyah (MI) terakreditasi minimal C	100%	$\frac{\sum \text{MI akreditasi A, B, C}}{\sum \text{MI}} \times 100$	100	100% ≥ 90% < 100% ≥ 80% < 90% < 80%	3 2 1 0
9	Tersedianya Madrasah Ta'limiyah (MTs) terakreditasi minimal C	100%	$\frac{\sum \text{MTs akreditasi A, B, C}}{\sum \text{MTs}} \times 100$	100	100% ≥ 90% < 100% ≥ 80% < 90% < 80%	3 2 1 0
10	Rasio Ketersediaan Guru pendidikan dasar SD dan SMP dibanding murid	1 : 20	$\frac{\sum \text{Siswa SD, SMP}}{\sum \text{Guru SD, SMP}}$		≥ 20 < 30 < 20 / > 30	3 0
11	Rasio Ketersediaan Guru pendidikan dasar MI dan MTs dibanding murid	1 : 15	$\frac{\sum \text{Siswa MI, MTs}}{\sum \text{Guru MI, MTs}}$		≥ 15 < 20 < 15 / > 20	3 0
12	Rasio Ketersediaan Guru PAUD dibanding murid	1 : 15	$\frac{\sum \text{Siswa PAUD}}{\sum \text{Guru PAUD}}$		≥ 15 < 20 < 15 / > 20	3 0
<b>HASIL</b>						<b>60</b>
13	Angka Putus Sekolah Usia pendidikan dasar	< 1%	$\frac{\sum \text{Siswa putus sekolah 7-12 th, 13-15 th}}{\sum \text{Siswa 7-12 th, 13-15 th}} \times 100$	100	< 1% > 1% < 2% > 2%	10 5 1
14	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	≥ 99%	$\frac{\sum \text{Lulusan SD, MI yang melanjutkan}}{\sum \text{Siswa lulus SD, MI}} \times 100$	100	≥ 99% ≥ 90% < 99% ≥ 80% < 90% < 80%	10 5 2 0

15 Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA	$\geq 96\%$	$\frac{\sum \text{Lulusan SMP, MTs yang melanjutkan}}{\sum \text{Siswa lulus SMP, MTs}} \times 100$	$\geq 96\%$ 10 $\geq 90\% < 96\%$ 5 $\geq 80\% < 90\%$ 2 $< 80\%$ 0
16 Angka Partisipasi Murni pendidikan Dasar	$\geq 96\%$	$\frac{\sum \text{Siswa 7-12 th, 13-15 th}}{\sum \text{Penduduk 7-12 th, 13-15 th}} \times 100$	$\geq 96\%$ 10 $\geq 90\% < 96\%$ 5 $\geq 80\% < 90\%$ 2 $< 80\%$ 0
17 Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar	98%	$\frac{\sum \text{Penduduk SD, MI, SMP, MTs}}{\sum \text{Penduduk 7-12 th, 13-15 th}} \times 100$	$\geq 98\%$ 10 $\geq 90\% < 98\%$ 5 $\geq 80\% < 90\%$ 2 $< 80\%$ 0
18 Angka Melek Huruf	96%	$\frac{\sum \text{Penduduk Usia } \geq 15\text{th dapat baca tulis}}{\sum \text{Penduduk Usia } \geq 15\text{th}} \times 100$	$\geq 96\%$ 10 $\geq 90\% < 96\%$ 5 $\geq 85\% < 90\%$ 2 $< 85\%$ 0

**HAK PEREMPUAN DAN ANAK**

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
<b>STRUKTURAL</b>			10	
1 Produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	5 0
2 Produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	5 0
<b>PROSES</b>			30	
3 Program pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	7,5 0

4 Program konseling dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau kejahatan	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	7.5 0
5 Program pengawasan/ penarikan pekerja anak	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	7.5 0
6 Tersedianya parti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	7.5 0
<b>HASIL</b>				<b>60</b>
7 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	1 : 100	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga}}{\sum \text{KDRT}}$	$\geq 100$ $> 90\% < 99.99\%$ $< 90$	30 15 0
8 Prosentase pekerja dibawah umur	$\leq 2\%$	$\frac{\sum \text{Pekerja anak usia 5-14th}}{\sum \text{Pekerja usia 5th ke atas}} \times 100$	$< 1\%$ $\geq 1\% < 10\%$ $> 10\%$	30 15 0

HAK ATAS KEPENDUDUKAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
<b>STRUKTURAL</b>			<b>10</b>	
1 Produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pencatatan sipil dan kependudukan	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	10 0
<b>PROSES</b>			<b>30</b>	
2 Prosentase kepemilikan KTP-el penduduk yang telah direkam	98%	$\frac{\sum \text{KTP-el didistribusikan}}{\sum \text{Perekaman KTP-el}} \times 100$	> 98% - > 90% < 98% - > 80% < 90% - < 80	7.5 5.5 3.5 0
3 Prosentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang telah memperoleh akte kelahiran	85%	$\frac{\sum \text{Penduduk usia 0-18th ber Akte Kelahiran}}{\sum \text{Penduduk usia 0 - 18th}} \times 100$	> 85% - > 80% < 85% - > 75% < 80% - < 75	7.5 5.5 3.5 0
4 Fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil	≥ 1		Ada Tidak ada	7.5 0
5 Prosentase Pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	99%	$\frac{\sum \text{Pemohon layanan tertangani}}{\sum \text{Pemohon layanan}} \times 100$	> 99% - > 90% < 99% - > 80% < 90% - < 80	7.5 5.5 3.5 0
<b>HASIL</b>			<b>60</b>	
6 prosentase penduduk memiliki KTP-el per satuan penduduk	99%	$\frac{\sum \text{penduduk usia } \geq 17 \text{ th memiliki KTP-el}}{\sum \text{penduduk usia } \geq 17 \text{ th}} \times 100$	> 99% - > 90% < 99% - > 80% < 90% - < 80	20 10 5 0

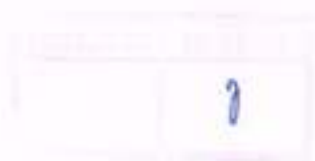
7	Prosentase pemberian Kartu Identitas Anak (KIA), Usia 0 - 17 tahun	85%	$\frac{\sum \text{penduduk usia 0 - 17th th memiliki KIA}}{\sum \text{penduduk usia 0 - 17th}} \times 100$	$\geq 85\%$ $> 75\% < 85\%$ $> 65\% < 75\%$ $< 65$	20 10 5 0
8	Prosentase pasangan nikah berakte perkawinan	98%	$\frac{\sum \text{Pasangan berakte kawin}}{\sum \text{pasangan nikah}} \times 100$	$\geq 98\%$ $> 90\% < 98\%$ $> 80\% < 90\%$ $< 80$	20 10 5 0

**HAK ATAS PEKERJAAN**

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
<b>STRUKTURAL</b>				10
1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai ketenaga kerjaan	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	5 0
2 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	5 0
<b>PROSES</b>				30
3 Prosentase ketersediaan Balai Latihan Kerja	$\geq 1\%$	$\frac{\sum \text{Balai latihan kerja}}{\sum \text{Tenaga kerja}} \times 1.000$	$\geq 1\%$ $< 1\%$	7.5 0
4 Prosentase ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan kantor pemerintahan	$\geq 55\%$	$\frac{\sum \text{Bangunan kantor pemerintah yang telah memiliki aksesibilitas}}{\sum \text{bangunan kantor pemerintah}} \times 100$	$\geq 55\%$ $> 50\% < 55\%$ $> 45\% < 50\%$ $< 45$	7.5 5.5 3.5 0
5 Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ada/ Tidak		Ada Tdk ada	7.5 0



6	Prosentase penanganan masalah hubungan industrial ditingkat bipartid	$\geq 60\%$	$\frac{\sum \text{Masalah Hubungan Industrial ditingkat bipartid}}{\sum \text{Masalah Hubungan Industrial}} \times 100$	100	$\geq 60\%$ $\geq 55\% < 60\%$ $\geq 50\% < 55\%$ $< 50$	7,5 5,5 3,5 0
<b>HASIL</b>						60
7	Prosentase Pengangguran Terbuka	$\leq 20\%$	$\frac{\sum \text{Pengangguran Terbuka}}{\sum \text{penduduk usia kerja}} \times 100$	100	$\leq 20\%$ $> 20\% < 30\%$ $> 30$	20 10 0
8	Angka partisipasi angkatan kerja	$\geq 85\%$	$\frac{\sum \text{Angkatan kerja usia 15th keatas}}{\sum \text{Penduduk usia 15th keatas}} \times 100$	100	$\geq 85\%$ $\geq 80\% < 85\%$ $\geq 70\% < 80\%$ $< 70$	20 10 5 0
9	Prosentase tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah	$> 2\%$	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja penyandang Disabilitas di instansi pemerintah}}{\sum \text{tenaga kerja di instansi pemerintah}} \times 100$	100	$\geq 2\%$ $\geq 1\% < 2\%$ $< 1\%$	20 10 0



HAK ATAS PERUMAHAN

INDIKATOR	TARGET HAN	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
<b>STRUKTURAL</b>				10
1. Tersedianya produk hukum daerah yang memuat ketentuan tentang perumahan dan kawasan pemukiman.	Ada/ Tidak		Ada	10
			Tidak ada	0
<b>PROSES</b>				30
2. Prosentase penanganan sampah	≥ 85%	$\frac{\sum \text{Volume Sampah tertangani}}{\sum \text{Volume produksi sampah}} \times 100$	≥ 85%	4,25
			> 75% < 85%	2,25
			< 75%	0

3	Prosentase penduduk berakses air minum	$\geq 62\%$	$\frac{\sum \text{Penduduk berakses air minum}}{\sum \text{penduduk}} \times 100$	100	$\geq 82\%$ $\geq 75\% < 82\%$ $\geq 65\% < 75\%$ $< 65$	4,25 2,25 1,25 0	
4	Prosentase rumah tinggal bersantasi	$\geq 98\%$	$\frac{\sum \text{Rumah tinggal bersantasi}}{\sum \text{Rumah tinggal}} \times 100$	100	$\geq 98\%$ $\geq 78\% < 98\%$ $\geq 58\% < 78\%$ $< 58\%$	4,25 2,25 1,25 0	
5	Prosentase bangunan ber IMB per satuan bangunan	$\geq 95\%$	$\frac{\sum \text{Bangunan ber IMB}}{\sum \text{Bangunan}} \times 100$	100	$\geq 95\%$ $\geq 80\% < 95\%$ $\geq 65\% < 80\%$ $< 65\%$	4,25 2,25 1,25 0	
6	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik	$\geq 75\%$	$\frac{\sum \text{Rumah tangga menggunakan listrik}}{\sum \text{Rumah tangga}} \times 100$	100	$\geq 75\%$ $\geq 70\% < 75\%$ $\geq 60\% < 70\%$ $< 60\%$	4,25 2,25 1,25 0	
7	Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	$\leq 86\%$	$\frac{\sum \text{Rumah tangga menggunakan air bersih}}{\sum \text{Rumah tangga}} \times 100$	100	$\geq 86\%$ $\geq 75\% < 86\%$ $\geq 65\% < 75\%$ $< 65\%$	4,25 2,25 1,25 0	
8	Program penyediaan rumah/ tempat tinggal	ada/tidak			Ada Tidak ada	4,5 0	
<b>HASIL</b>							60
9	Prosentase Penduduk tinggal di rumah layak huni	86%	$\frac{\sum \text{Penduduk yang tinggal di rumah layak huni}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$	100	$\geq 86\%$ $\geq 75\% < 86\%$ $\geq 65\% < 75\%$ $< 65\%$	30 20 10 0	
10	Rasio pemukiman layak huni	80%	$\frac{\sum \text{Luas Pemukiman layak huni}}{\sum \text{Luas Wilayah pemukiman}} \times 100$	100	$\geq 80\%$ $\geq 70\% < 80\%$ $\geq 60\% < 70\%$ $< 60\%$	30 20 10 0	

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR	TARGET HAM	FORMULASI	PENILAIAN	
			Capaian	NILAI
<b>STRUKTURAL</b>				10
1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai : - Rencana Tata Ruang - Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pencemaran Udara - Pemakaman - Lain-lain	Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak		Ada Ada Ada Ada Ada Tidak ada	2 2 2 2 2 0
<b>PROSES</b>				30
2 Prosentase ketersediaan fasilitas ruang bermain, sarana olah raga, dan taman sebesar 10% dari luas wilayah	10%	$\frac{\sum \text{Luas fasilitas bermain, SOR, taman}}{\sum \text{Luas wilayah}} \times 100$	> 10% ≥ 5% < 10% ≥ 2% < 5% < 2%	3 1,5 1 0
3 Prosentase tempat pemakaman umum per satuan penduduk	80%	$\frac{\sum \text{Daya tampung TPU}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$	> 80% ≥ 70% < 80% ≥ 60% < 70% < 60%	3 1,5 1 0
4 Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
5 Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
6 Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat dapat berupa posko maupun media online	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0

7	Program olahraga masyarakat	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
8	Program gerakan penanaman pohon	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
9	Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
10	Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
11	Program pembinaan forum komunikasi umat beragama	Ada/ Tidak		Ada Tidak ada	3 0
<b>HASIL</b>					
12	Tingkat pencemaran udara berdasarkan index Standar Pencemaran Udara (ISPU)	0 - 50		< 50 > 50	20 0
13	Prosentase ketersefiaan Ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota/ kawasan kota	50%	$\frac{\sum \text{Luas Ruang terbuka hijau}}{\sum \text{Luas wilayah}} \times 100$	> 50% > 40% < 50% > 30% < 40% < 30%	20 10 5 0
14	Penurunan Angka kriminalitas	Naik/ Turun		Tetap/ Turun Naik	20 0

RUMUS PENILAIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM:

$$\bar{x} = \sum x / n$$

Keterangan :

$\bar{x}$  : Nilai Rata Rata  
 $x$  : Jumlah Capaian seluruh Indikator  
 $n$  : Jumlah Kriteria

$\geq 75$  sampai dengan 100 untuk kriteria Peduli HAM  
 $\geq 65$  sampai dengan  $< 75$  untuk kriteria Cukup Peduli HAM  
 $\geq 50$  sampai dengan  $< 65$  untuk kriteria Mulai Peduli HAM  
 $< 50$  untuk kriteria Kurang Peduli HAM

**BUPATI BALANGAN,**

**H. ANSHARUDDIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 36 TAHUN 2017  
TENTANG PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH KABUPATEN PEDULI  
HAK ASASI MANUSIA

**FORMAT DATA PENILAIAN KRITERIA DAERAH  
KABUPATEN PEDULI HAM**

LAPORAN HAK ATAS KESEHATAN

- 1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan/  
Layanan Kesehatan :

Ada  Tidak Ada

*\*J beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2 Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):

- Jumlah APBD tahun pelaporan Rp.

- Jumlah Anggaran Kesehatan tahun pelaporan Rp.

- 3 Ketersediaan tenaga dokter per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter

- 4 Ketersediaan tenaga dokter spesialis per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter Spesialis

- 5 Ketersediaan Bidan per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Bidan

- 6 Ketersediaan Perawat per penduduk
- Jumlah Penduduk
  - Jumlah Perawat
- 7 Ketersediaan Puskesmas per penduduk
- Jumlah Penduduk
  - Jumlah Puskesmas
- 8 Ketersediaan Puskesmas Pembantu per penduduk
- Jumlah Penduduk
  - Jumlah Puskesmas Pembantu
- 9 Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terakreditasi nasional
- Jumlah RSUD terakreditasi nasional
- 10 Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi nasional (AN) di tingkat kecamatan
- Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas terakreditasi nasional
  - Jumlah kecamatan
- 11 Ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk
- Jumlah penduduk
  - Jumlah tempat tidur
- 12 Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi
- Jumlah bayi yang mendapatkan IDL
  - Jumlah bayi
- 13 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Jumlah Kepesertaan JKN
  - Jumlah Penduduk
- 14 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran
- Angka Kematian Bayi
  - Jumlah Kelahiran Hidup
- 15 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran
- Angka Kematian Ibu
  - Jumlah Kelahiran Hidup

16 Prevelensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita

- Jumlah balita kurang gizi dan gizi buruk
- Jumlah balita


Demikian data capaian di bidang kesehatan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....  
Kepala Dinas .....

(.....)



LAPORAN HAK ATAS PENDIDIKAN

- 1 Produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan/ layanan pendidikan

Ada  Tidak Ada

*\*J beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2 Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Jumlah APBD di tahun pelaporan Rp.

- Jumlah Anggaran Kesehatan di tahun pelapor Rp.

- 3 Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan

- Jumlah Kecamatan yang memiliki PKBM

- Jumlah Kecamatan

- 4 Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tingkat kabupaten/kota

- Jumlah SKB

- 5 Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan

- Jumlah Desa dan Kelurahan

- Jumlah PAUD

- 6 Tersedianya Sekolah Dasar Terakreditasi (minimal C)

- Jumlah SD terakreditasi A, B, dan C

- Jumlah seluruh SD

- 7 Tersedianya Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi (minimal C)
- Jumlah SMP terakreditasi A, B, dan C
  - Jumlah seluruh SMP
- 8 Tersedianya Madrasah Ibtidaiyah Terakreditasi (minimal C)
- Jumlah MI terakreditasi A, B, dan C
  - Jumlah seluruh MI
- 9 Tersedianya Madrasah Tsanawiyah Terakreditasi (minimal C)
- Jumlah MTs terakreditasi A, B, dan C
  - Jumlah seluruh MTs
- 10 Ketersediaan Guru berbanding murid pada pendidikan dasar SD dan SMP
- Jumlah Siswa SD dan SMP
  - Jumlah Guru SD dan SMP
- 11 Ketersediaan Guru MI dan MTs berbanding murid
- Jumlah Siswa MI dan MTs
  - Jumlah Guru MI dan MTs
- 12 Ketersediaan Guru PAUD berbanding murid
- Jumlah Siswa PAUD
  - Jumlah Guru PAUD
- 13 Angka Putus Sekolah usia pendidikan dasar
- Jumlah Siswa putus sekolah usia 7-12th dan 13-15th
  - Jumlah Siswa usia 7-12th dan 13-15th
- 14 Angka melanjutkan sekolah SD/ MI ke SMP/MTs
- Jumlah lulusan SD dan MI yang melanjutkan
  - Jumlah seluruh siswa lulus SD dan MI
- 15 Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/MA
- Jumlah lulusan SMP dan MTs yang melanjutkan
  - Jumlah seluruh siswa lulus SMP dan MTs
- 16 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar
- Jumlah siswa usia 7-12th dan 13-15th
  - Jumlah penduduk usia 7-12th dan 13-15th

- Jumlah penduduk SD, MI, SMP, MTs
- Jumlah penduduk usia 7-12th dan 13-15th


18 Angka Melek Huruf

- Jumlah penduduk usia 15th keatas bisa baca tulis
- Jumlah penduduk usia 15th keatas


Demikian data capaian di bidang pendidikan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....  
Kepala Dinas .....

(.....)

LAPORAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

- 1 Produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Ada  Tidak Ada

*\*j) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

..... ..... ..... .....
----------------------------------

- 2 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak

Ada  Tidak Ada

*\*j) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

..... .....
----------------

- 3 Program pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak

Ada  Tidak Ada

*\*j) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

- 4 Program konseling/rehabilitasi bagi anak korban tindak kekerasan/kejahatan

Ada  Tidak Ada

*\*j) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

Ada                       Tidak Ada

*\*j) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

**6 Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak**

Ada                       Tidak Ada

*\*j) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

**7 Rasio terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

- Jumlah rumah tangga
- Jumlah kekerasan dalam rumah tangga

**8 Kasus pekerja di bawah umur**

- Jumlah pekerja anak usia 5-14th
- Jumlah pekerja usia 5th keatas

Demikian data capaian di bidang perempuan dan anak ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

.....  
Kepala Dinas .....

{.....}

7 Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA), Usia 0 - 17 tahun

- Jumlah penduduk usia 0 - 17th memiliki KIA
- Jumlah penduduk usia 0 - 17th

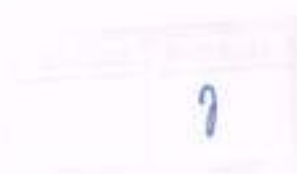
8 Pasangan nikah berakte perkawinan

- Jumlah pasangan nikah berakte kawin
- Jumlah pasangan nikah

Demikian data capaian di bidang kependudukan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....  
Kepala Dinas .....

{.....}



LAPORAN HAK ATAS KEPENDUDUKAN

- 1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pencatatan Sipil dan Kependudukan

Ada  Tidak Ada

*\*J beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2 Prosentase kepemilikan KTP-el penduduk yang telah direkam

- Jumlah KTP-el yang telah didistribusikan

- Jumlah KTP-el yang telah direkam

- 3 Prosentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang telah memperoleh akte kelahiran

- Jumlah penduduk usia 0-18th yang memiliki akte

- Jumlah penduduk usia 0-18th

- 4 Fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil

- Jumlah fasilitas layanan kependudukan dan capil

- 5 Pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

- Jumlah pemohon layanan yang tertangani

- Jumlah seluruh pemohon layanan

- 6 Penduduk memiliki KTP-el per satuan penduduk

- Jumlah penduduk usia 17th ke atas memiliki KTP-el

- Jumlah penduduk usia 17th ke atas

LAPORAN HAK ATAS PEKERJAAN

1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai ketenaga kerjaan

Ada  Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
.....
.....
.....
.....

2 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Ada  Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
.....

3 Ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK)

- Jumlah Balai Latihan Kerja
- Jumlah tenaga kerja

4 Ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan kantor pemerintahan

- Jumlah bangunan kantor pemerintahan yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- Jumlah bangunan kantor instansi pemerintah

5 Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ada  Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
.....

- 6 Penanganan masalah hubungan industrial di tingkat bipartid
- Jumlah masalah hubungan industrial di tingkat bipartid
  - Jumlah seluruh masalah hubungan industrial
- 7 Tingkat pengangguran terbuka
- Jumlah pengangguran terbuka
  - Jumlah penduduk usia kerja
- 8 Angka partisipasi angkatan kerja
- Jumlah angkatan kerja usia 15th ke atas
  - Jumlah penduduk usia 15th ke atas
- 9 Tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah
- Jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas pada instansi pemerintah daerah
  - Jumlah tenaga kerja pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota

Demikian data capaian di bidang pekerjaan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....  
Kepala Dinas .....

Tanda Tangan + Stempel

(Nama.....)

LAPORAN HAK ATAS PERUMAHAN

- 1 Tersedianya produk hukum daerah yang memuat ketentuan tentang perumahan dan kawasan pemukiman

Ada                       Tidak Ada

*\*J beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2 Prosentase penanganan sampah

- Volume sampah yang tertangani

- Volume produksi sampah

- 3 Penduduk berakses air minum

- Jumlah penduduk berakses air minum

- Jumlah penduduk

- 4 Prosentase rumah tinggal bersanitasi

- Jumlah rumah tinggal bersanitasi

- Jumlah rumah tinggal

- 5 Prosentase bangunan ber IMB per satuan bangunan

- Jumlah bangunan ber IMB

- Jumlah bangunan

- 6 Prosentase rumah tangga menggunakan listrik

- Jumlah rumah tangga menggunakan listrik

- Jumlah rumah tangga

- 7 Prosentase rumah tangga menggunakan air bersih

- Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih

- Jumlah rumah tangga

8 Program penyediaan rumah tempat tinggal

Ada                       Tidak Ada

*\*j beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

9 Rumah layak huni per satuan penduduk

- Jumlah rumah layak huni

- Jumlah keluarga

10 Pemukiman layak huni

- Jumlah pemukiman layak huni

- Jumlah wilayah pemukiman

Demikian data capaian di bidang perumahan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

.....  
Kepala Dinas .....

Tanda Tangan + Stempel

{Nama.....}

## LAPORAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

### 1. Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai :

- Rencana tata ruang

Ada       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
-------

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Ada       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
-------

- Pencemaran udara

Ada       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
-------

- Pemakaman

Ada       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
-------

- Peraturan lain terkait lingkungan

Ada       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan*

.....
-------

2 Ketersediannya fasilitas ruang bermain, sarana olah raga, dan taman sebesar 10% dari luas wilayah

- Luas fasilitas bermain, SOR, taman

- Luas wilayah

3 Tempat pemakaman umum per satuan penduduk

- Jumlah daya tampung TPU

- Jumlah penduduk

4 Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum

Ada

Tidak Ada

*\*j beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

5 Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Ada

Tidak Ada

*\*j beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

6 Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat dapat berupa posko maupun media online

Ada

Tidak Ada

*\*j beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis fasilitas yang disediakan*

..... .....
----------------

- 7 Program olah raga masyarakat  
 Ada                       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

- 8 Program penanaman pohon  
 Ada                       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

- 9 Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan  
 Ada                       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

- 10 Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan  
 Ada                       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

- 11 Program pembinaan forum komunikasi umat beragama  
 Ada                       Tidak Ada

*\*) beri tanda X pada kotak pilihan*

*Jika ada, sebutkan beberapa jenis program kegiatan yang dilakukan*

..... .....
----------------

- 12 Tingkat pencemaran udara berdasarkan index Standar Pencemaran Udara (ISPU)
- Jumlah pencemaran udara berdasarkan ISPU
- 13 ketersediaan Ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota/ kawasan kota
- Luas ruang terbuka hijau
  - Luas wilayah
- 14 Penurunan angka kriminalitas
- Angka kriminalitas tahun pelaporan
  - Angka kriminalitas tahun sebelumnya

Demikian data capaian di bidang lingkungan yang berkelanjutan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

.....  
Kepala Dinas .....

Tanda Tangan + Stempel

(Nama.....)

**BUPATI BALANGAN,**

**H. ANSHARUDDIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**